

Paradigma Baru TNI

Oleh Dini Dewi Heniarti

"Dengan kekompakan TNI, maka baik istana maupun partai-partai tidak lagi dapat mengintervensi"

Penegasan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso agar prajurit TNI harus bersikap netral, terkait dengan politik praktis menjelang Pilpres 2009, ditindaklanjuti dengan perintah masuk barak selama 2-3 hari. Tantangan TNI dalam menjaga dan mengawal netralitas semakin berat, karena adanya pengerahan sejumlah purnawirawan dalam "Kereta Pilpres" yang mendeklarasikan dukungan terhadap masing-masing pasangan. Bagaimana kesolidan TNI menjelang pilpres?

Komitmen TNI untuk melaksanakan reformasi yang salah satunya adalah netralitas TNI adalah kemauan politik TNI, untuk mewujudkan tentara profesional dalam memerankan diri sebagai alat negara di bidang pertahanan negara. TNI telah memiliki komitmen, untuk menjauhkan diri dari keterlibatannya dalam politik praktis.

Dalam soliditas yang ada, hendaknya tindakan ataupun tingkah laku apa pun selalu sejalan dengan garis komando dalam struktural. Melalui paradigma baru TNI yaitu pelaksanaan tugas TNI dalam rangka tugas negara, diarahkan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan fungsional. TNI tidak bertugas untuk kepentingan diri sendiri, tetapi setiap tugas yang dilaksanakan TNI senantiasa merupakan tugas negara berdasarkan keputusan politik. TNI sebagai aset dan salah satu instrumen kekuatan nasional, maka apa yang dilakukan TNI didasarkan pada kesepakatan bangsa dan yang diputuskan melalui mekanisme konstitusional.

Sebagai bagian dari sistem nasional, TNI tidak hadir dalam isolasi maupun eksklusif. Oleh karena itu, tindakan TNI tidak bersifat otonom tetapi mempunyai keterkaitan dengan bagian lain dalam sistem nasional. Paradigma baru peran TNI murni diarahkan untuk mewujudkannya yang profesional, berperan sebagai instrumen pertahanan nasional bebas dari politik dan yang lain di luar pertahanan. Dengan demikian, reformasi TNI (salah satunya netralitas) tidak dapat diserahkan dan dituntut kepada TNI saja, karena konsekuensi memasuki tatanan demokrasi, kekuasaan politik untuk menentukan kebijakan nasional berada pada elite politik pejabat publik, yang telah dipilih oleh rakyat.

Reformasi TNI merupakan proses dua arah kesepahaman antara TNI dan otoritas politik, untuk memahami kewenangan masing-masing dan saling menghargai kewenangan satu sama lain. TNI menempatkan dirinya sebagai posisi yang tunduk peraturan perundang-undangan berlaku dan kontrol sipil . Politisi sipil memerlukan kesepahaman masalah pertahanan dan kultur militer serta tidak menggunakan TNI bagi partisan dan dukungan kekuasaannya. Bukan mustahil ada juga kepentingan-kepentingan politik sipil, yang akan menarik-narik mereka (TNI) dalam proses berjalan. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi politisasi tentara.

Adalah kekerdilan bila mengira bahwa mantan TNI itu bisa melakukan apa saja terhadap TNI. Kalau politisi bersikap begitu, berarti membiarkan alat negara yang satu ini hidup liar, apalagi kemudian dicurigai, bahkan ditakuti. Namun, ketika politisi menyerahkan persoalan reformasi TNI dilakukannya sendiri, ini kenyataan yang seharusnya petunjuknya digariskan oleh MPR RI/politisi. Untuk bersikap begitu, mereka bertanya "apakah TNI mau?"

Ini pertanyaan minderwardigheid complex yang mendudukkan TNI, sebagai kekuatan dan bukan sebagai alat negara. Siapa penanggung jawab untuk memastikan TNI, sebagai alat negara dan tidak membiarkan TNI berkembang menjadi kekuatan yang tak tertandingi? Siapa pun ia, harus tahu benar dapur TNI. Kehidupan prajurit universal diatur secara seragam, dengan peraturan militer dasar dan itu berlaku bagi tentara darat, laut, dan udara di semua negara di seluruh dunia.

Semuanya dengan konsekuensi sanksi yang sangat berat, karena prinsip militer adalah kill or to be killed. Agar tidak terbunuh (merugikan negara), dan sebaliknya bisa membunuh musuh dalam waktu singkat (keuntungan

negara), dengan bekal yang sekecil-kecilnya (seperti prinsip bisnis), maka hidupnya harus tertib. Bila gagal dalam pelaksanaan tugas, yang layak dikatakan cuma "siap salah". Untuk tugas negara yang ditentukan oleh kesepakatan seluruh politisi, atau dagang politik yang ditentukan oleh kelompok politik tertentu. Seperti alat berupa pisau, tergantung pengguna. Bisa untuk membunuh, tetapi bisa juga untuk berbuat baik.

Filosofinya, cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan.. Secara singkat software, yang sistemik itu bisa dijabarkan dari makro ke mikro mulai dari Sapta marga di pucuk, Pinaka Baladika berisi nilai-nilai kejiwaan yang harus diimplementasikan.

Secara teoritis dan historis demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan fitrah manusia, karena harkat dan martabat manusia memperoleh tempat yang terhormat. Dalam realitas sejarah pemerintahan, demokratis lebih tahan terhadap goncangan. Oleh karena itu, perkembangan reformasi TNI ke masa depan akan sangat ditentukan oleh visi, misi, kemauan politik, dan komitmen pemerintah untuk mereformasi TNI.

*Oleh karena itu, untuk menjaga netralitas TNI menjelang pilpres, "pengarantinaan" prajurit TNI, bukanlah satu-satunya solusi, karena itu hanya pengarantinaan secara fisik. Yang lebih penting adalah pengarantinaan ide-ide/paradigma lama TNI sudah tidak sesuai lagi dan lebih utama lagi adalah dengan melakukan reformasi budaya TNI melalui paradigma baru TNI.****

Penulis, kandidat doktor Ilmu Hukum Unpad, dosen HAM dan Peradilan Militer Unisba.

Sumber :

Pikiran Rakyat, Rabu, 3 Juni 2009

<http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=78779>